

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Batam merupakan salah satu dari gugusan pulau di Kepulauan Riau. Wilayah Kepulauan Riau yang luas tersebut mencakup beberapa pulau yakni Batam, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Anambas, Natuna, dan Lingga. Kondisi geografis Pulau Batam cenderung berbukit sehingga dikelilingi semak belukar dan hutan. Mengingat kondisi geografis ini, Pulau Batam memang telah dikelilingi hutan sebelum pengembangan besar-besaran. Keberadaannya kini, sebagai salah satu kawasan industri berkembang dan telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) menurut PP no 46 tahun 2007.

Keberadaan status lahan di Batam yang didaulat masih berstatus hutan lindung menjadi masalah serius saat ini. Kawasan pemukiman padat penduduk dengan berbagai sektor kehidupan seperti industri dan perumahan menjadi terkatung-katung kejelasan lahannya. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional di Batam tidak dapat mengeluarkan sertifikat lahan dikarenakan bangunan tersebut berdiri diatas lahan yang berstatus hutan lindung.

Turunnya SK Menhut nomor 463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan dirasa tidak mengakomodir usulan Tim Terpadu Serasi. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa 60% lahan di Batam berstatus hutan lindung. Masalah menjadi bermunculan karena disinyalir, turunnya SK ini berdasarkan SK Surat Penetapan Kawasan Hutan Lindung tahun 1986. Di lain sisi juga tidak

mencantumkan beberapa peraturan seperti: PP no 87/2011 tentang Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Kepres no 41/1973 tentang Pemberian Kewenangan Pengelolaan Lahan di Batam, serta PP no 46/2007 tentang Kawasan *Free Trade Zone*. Kemelut hutan lindung menjadi semakin panjang karena turunnya SK ini dirasa menimbulkan banyak kerugian dari sektor riil bagi masyarakat Kota Batam maupun investor. (Ane dan Antara, 2013: 1)

Penggambaran kasus terbitnya SK Menhut no 463/Menhut-II/2013 secara garis besar kemudian dikaitkan dengan sejarah yang memang sudah terjadi di abad lalu karena bertumpu pada faktor kapitalisme yang menurut Faki dalam Dietz (1998: v) mengatakan bahwa persengketaan hak pemilikan, peruntukan, dan pengelolaan lingkungan alam dalam suatu kawasan, bukanlah suatu gejala baru. Artinya, gejala seperti ini sudah terjadi sejak lama, sejak beberapa abad yang lalu. Apalagi kawasan lingkungan alam yang kemudian disebut sebagai sumber daya alam telah menjadi faktor penting dalam perkembangan kapitalisme.

Peneliti mengaitkan kasus ini dengan beberapa artikel tentang hutan dan media yang memberitakannya. Penelitian dilakukan oleh Kelly Biedenweg, seorang mahasiswa dari Stanford University jurusan Woods Institute for the Environment dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul "*A framework for Evaluating Forest Conservation Implication of Community-based Capacity Building: Experiences from the Northern Bolivian Amazon*" tahun 2012.

Biedenweg (2012: 260-266) mengacu pada studi pengalaman di Pando, sebuah wilayah bagian utara dari suku Bolivia Amazon. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan standar hidup di masyarakat miskin dan juga

mempromosikan hutan konservasi sebagai basis pemeliharaan keanekaragaman hayati. Biedenweg menyatakan bahwa proyek pengembangan kapasitas hutan berbasis masyarakat ini dilaksanakan untuk mengelola hutan bagi masyarakat itu sendiri. Ada tingkat partisipasi masyarakat dalam proyek pengembangan kapasitas hutan seperti kayu, kacang Brazil, dan pertanian. Proyek ini nantinya akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar karena secara geografis dekat dengan kota, jaminan kepemilikan tanah, hubungan sejarah dan kemudahan mengaksesnya.

Namun, dalam kesimpulan penelitian Biedenweg ini, ia mengatakan bahwa peran inisiatif dalam kapasitas pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih minim untuk dipahami. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan bentang alam memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyatukan antara proyek ini, partisipasi masyarakat, dan perubahan fisik dari lahan hutan ini. Pengelolaan SDA yang masih minim ini didasarkan pada kurangnya aspek pengetahuan masyarakat, keterampilan dan perilaku tanggap pengelolaan hutan. Padahal peran pengembangan kapasitas ini untuk mencapai tujuan bersama yakni pemeliharaan hutan konservasi (Biedenweg, 2012: 267-268)

Studi lainnya yakni tentang apakah wacana media dapat mengubah kebijakan kehutanan yang mengambil lokasi penelitian di Bangladesh. Menurut Sadath dan Kroth (2013) permasalahan kehutanan banyak di bahas pada media cetak di Bangladesh. Aktor kebijakan baik dari pusat maupun perifer berpartisipasi dalam diskusi media untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam kepentingannya terhadap masalah hutan. Media memainkan peranan penting

dalam pembangunan dalam konteks sosial, lingkungan, dan ekonomi. Penelitian ini mencoba untuk menentukan seberapa besar pengaruh wacana media terkait perubahan kebijakan Kehutanan di Bangladesh. Analisis wacana media ini mengambil The Daily Ittefaq sebagai sampel media cetak terkemuka di Bangladesh dan dokumen terkait kebijakan kehutanan Bangladesh tahun 1989-2010.

Bangladesh merupakan salah satu negara berkembang yang paling padat penduduknya di dunia yang memiliki 2,52 juta Ha Hutan. Kontribusi hutan terhadap produk domestik bruto negara (GDP) sekitar 2 %. Hutan didaulat sebagai salah satu sumber utama energi dan penghidupan bagi masyarakat Bangladesh. Hal ini kemudian menyebabkan sektor kehutanan Bangladesh terjadi penipisan sumber daya hutan terus menerus baik dari segi wilayah dan kualitas. Belum lagi muncul isu perubahan iklim sebagai ancaman terbesar. (Sadath dan Krott, 2013: 1-2)

Menurut Sadath dan Krott (2013: 2-4), media cetak di Bangladesh ikut memberitakan isu kehutanan ini. Peliputan media atas isu hutan ini memiliki beberapa pengaruh atas kebijakan kehutanan. Media menjadi penyedia ruang publik dimana penyampaian pendapat dan kepentingan dari stakeholder ditemukan. Oleh karena itu, wacana media tentang masalah kehutanan bisa dipahami sebagai pertarungan pendapat dari posisi aktor kebijakan pada isu-isu tersebut. Oleh karena itu dapat diasumsikan dengan mempromosikan arah kebijakan tertentu, media memainkan peran kunci dalam perubahan kebijakan. Sehingga, media cetak mungkin secara sadar membingkai isu hutan untuk

advokasi kebijakan tertentu. Berdasarkan teori ini, studi ini menunjukkan hipotesis bahwa wacana media tentang isu hutan tertentu dapat memulai perubahan kebijakan Kehutanan di Bangladesh dan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk meneliti ini.

Hasil penelitian Sadath dan Krott (2013: 8-9) menemukan empat program kebijakan utama di sektor kehutanan Bangladesh yakni deforestasi, konservasi kehidupan liar, perambahan hutan, dan penghijauan pesisir. Masalah konservasi, deforestasi, dan satwa liar mendominasi wacana hutan di media di Bangladesh. Media menyoroti penyebab dan masalah yang terjadi pada deforestasi dan konservasi satwa liar dan konflik. Perhatian media sangat rendah terkait perubahan kebijakan. Penggunaan analisis kualitatif untuk melihat perubahan kebijakan dari isu hutan tersebut, diungkapkan bahwa tidak ada keterkaitannya dengan isi laporan media. Akhirnya, temuan penelitian mengungkapkan bahwa wacana media tidak mendorong perubahan kebijakan kehutanan di Bangladesh, melainkan wacana hutan terkait faktor pendorong terkait kebutuhan internal, keinginan administrasi hutan, komitmen politik pemerintah, komitmen untuk perjanjian internasional dan mitra pembangunan internasional.

Penelitian lain yang serupa, pemberitaan mengenai pemingkakan berita konferensi perubahan iklim Kopenhagen 2009 di SKH Kompas yang dilakukan oleh Nugroho (2011). Nugroho memaparkan bahwa berita konferensi tersebut adalah berita mengenai lingkungan yang terkait dengan kepentingan Indonesia. Nugroho menggunakan media SKH Kompas karena Kompas sebagai harian nasional yang melihat kepentingan lingkungan menjadi sangat penting. Penekanan

pada wartawan yang meliput konferensi tersebut agar memberitakan sesuai dengan frame yang sudah disepakati, apalagi pemberitaan ini dari awal sudah memihak pada lingkungan, pihak yang dirugikan seperti masyarakat adat dan masyarakat kecil adalah pihak yang didukung Kompas (Nugroho, 2011: v)

Melalui pemberitaan yang dilakukan Kompas, sebenarnya adalah suatu cara mempengaruhi arah kebijakan pemerintah yang sebelumnya mengarah pada ekonomi pembangunan menjadi lebih berpihak kepada masyarakat yang berdampak pada perubahan iklim. Arah pemberitaan sepenuhnya ditentukan oleh redaksi Kompas sehingga redaksi sebagai agen utama pembentukan frame pemberitaan Kopenhagen 2009 (Nugroho, 2011: 141-142)

Frame pemberitaan Kompas yang telah dianalisis oleh Nugroho terbagi menjadi tiga bagian yakni Kompas memandang kepentingan laut adalah hal yang penting. Kompas menitikberatkan tentang kelautan sebagai isu terpenting bagi Indonesia. Kompas menganggap kelautan berdampak langsung pada perubahan iklim dan akan mempengaruhi masyarakat pesisir yang akan mengalami kerugian besar. Frame selanjutnya adalah Kompas menentang pendanaan dengan kriteria offset yang sering diungkapkan pihak ORNOP sebagai jual beli karbon. Kompas memandang pendanaan ini tidak masuk akal karena produksi karbon setiap negara berbeda apabila dihitung dengan luas hutan. Selanjutnya, Kompas mengkritisi pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kancan Kopenhagen 2009. Hal ini didasarkan pada sikap pemerintah yang tidak tegas dan seringkali menyerah dengan berbagai tekanan dari negara maju dan melupakan kepentingan lingkungan Indonesia. Hal ini jelas terlihat dengan pencaangan

pemotongan 26 persen karbon oleh Indonesia. Padahal, Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang wajib melakukan pengurangan karbon (Nugroho, 2011: 138-139).

Peneliti juga melihat penelitian lain mengenai analisis framing. Penelitian tersebut tentang pemberitaan rencana penutupan lokasi Lembah Harapan Baru KM.17 Balikpapan pada surat kabar harian Kaltim Post yang dilakukan oleh Sibarani (2010), memaparkan bahwa adanya rencana penutupan lokasi Lembah Harapan Baru yang merupakan lokasi terbesar di Balikpapan. Rencana penutupan berasal dari Pemerintah Kota Balikpapan ini didasarkan pada rekomendasi Komisi Fatwa MUI Balikpapan dan desakan berbagai ormas Islam. Di sisi lain, keberadaan Lembah Harapan Baru sudah dianggap tidak sesuai dengan fungsi awalnya yakni sebagai tempat rehabilitasi bagi para PSK. Rencana ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan (Sibarani, 2010: 1-3)

Rencana penutupan lokasi Lembah Harapan Baru dikemas menjadi sebuah berita oleh SKH Kaltim Post. Kaltim Post adalah salah satu media cetak terbesar di Balikpapan. Kaltim Post bukan sekedar media, namun juga memiliki idealisme untuk membangun Kaltim dari segala sektor, mulai sektor politik, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Fungsinya bukan saja sebagai penyalur informasi, namun juga memiliki idealisme untuk membangun SDM di pelosok tanah air. Berangkat dari latar belakang media tersebut, Kaltim Post memiliki cara untuk membingkai kasus dan dalam analisis framing yang menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki, dapat terlihat

hubungan antara teks dan konteks. Teks berita yang dibuat media dipengaruhi oleh konteks peristiwa yang terjadi di Balikpapan dan konteks dimana pekerja media bekerja (Sibarani, 2010: 34-37)

Dalam penelitiannya, Sibarani (2010: 210) melihat ada bagaimana Kaltim Post membingkai kasus ini dan sikap Kaltim Post terhadap rencana penutupan lokalisasi ini. Frame besar yang ditemukan adalah Kaltim Post membingkai bahwa keberadaan lokalisasi LBH KM 17 Balikpapan memang harus ditutup karena telah berjalan tidak sesuai dengan fungsi awalnya yakni sebagai tempat rehabilitasi bagi para PSK dan keberadaan lokalisasi ini dinilai sebagai sumber penyakit masyarakat yang dinilai tidak sesuai lagi berada di Balikpapan. Selain bingkai dari berita-berita, Kaltim Post juga bersikap mendukung rencana Pemkot Balikpapan untuk melakukan penutupan, karena pada dasarnya Kaltim Post mendukung setiap program Pemkot Balikpapan yang mereka nilai positif.

Pemberitaan kontroversi terkait terbitnya SK Menhut yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Batam khususnya menjadi menarik untuk diteliti. Penulis ingin melihat bagaimana media mengkonstruksikan kontroversi terkait terbitnya SK Menhut dalam pemberitaannya. Konstruksi media tidak dapat lepas bagaimana cara pandang jurnalis medianya menangkap maksud berita tersebut. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan sikap media terhadap adanya kontroversi ini apakah ada keberpihakan atau tidak. Mengingat, di dalam sebuah keredaksian, media tidak mungkin netral dan pastinya memiliki kepentingan di dalamnya. Menurut Eriyanto (2002: 69) setiap hari jurnalis berhadapan dengan beragam peristiwa dengan berbagai pandangan dan kompleksitasnya. Lewat frame, jurnalis

mengemas peristiwa yang kompleks itu menjadi peristiwa yang dapat dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak.

Peneliti juga ingin melihat bagaimana kasus ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan jurnalisme lingkungan. Abrar (1993: 78) mengatakan bahwa semakin sering wartawan mengungkapkan perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup, akan semakin bermanfaat berita itu buat masyarakat.

Enam puluh persen wilayah Batam disinyalir masuk dalam zona hutan lindung menurut SK tersebut. Meruntut hal itu, pembaca digiring untuk melihat realitas sosiologis lingkungan saat ini. Hutan di Pulau Batam sedikit demi sedikit dikeruk untuk kepentingan bisnis dan pembangunan. Namun, pemilik kepentingan tersebut tidak memikirkan bagaimana dampak dari pengerukan tersebut. Batam yang ditetapkan sebagai Kota Industri, pastilah sudah siap dengan kenyataan bahwa dampak polusi udara akan menghantui masyarakatnya. Perubahan cuaca yang sangat ekstrem akhir-akhir ini memberikan dampak bagi masyarakat Kota Batam yang kini mengeluh banjir di setiap sudut kota. Jurnalisme lingkungan ingin melihat bagaimana kasus kontroversi ini dapat dikaitkan antara kondisi alam Pulau Batam saat ini, turunnya SK ini, dan peran penggiat media untuk memberitakan kasus ini dari sisi lain karena dampak yang berkembang ke depannya sangat besar.

Pengulasan lebih dalam tentang penelitian ini, peneliti menggunakan media Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos. Penggunaan dua surat kabar lokal ini digunakan sebagai pembanding dalam mengemas kasus kontroversi terbitnya SK Menhut ini. Kedua surat kabar lokal ini surat kabar yang telah

memiliki eksistensi di tengah masyarakat Kepulauan Riau, khususnya masyarakat Kota Batam.

Harian Tribun Batam merupakan salah satu surat kabar cetak yang terbit di Kepulauan Riau. Keberadaannya tidak lepas dari statusnya sebagai Pers Daerah yang dimiliki Kompas Gramedia Group (KGG) yang masuk dalam jaringan *Tribun Network*. Seperti yang dikutip dari *Media Profile* Harian Tribun Batam tahun 2012, oplah Tribun Batam per hari sebanyak 53.435 eksemplar ini mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya.

Harian Tribun Batam pernah mendapat penghargaan *Silver Winner* kategori *The Best Sumatera Newspaper Front Page Design* yang diselenggarakan Serikat Penerbit Surat Kabar yang bekerja sama dengan Pressmart Indonesia pada Juli 2010 (Kompas, 2010). Penghargaan bergengsi yang di terima Tribun Batam ini menandakan bahwa koran ini sudah mendapat tempat terbaik di mata pembaca Kepri. Hal ini merupakan perpaduan karya intelektual dan seni sehingga mampu memberikan sajian informasi yang bermakna namun menarik dilihat dari sisi perwajahan koran Tribun Batam.

Media lokal lainnya yang menjadi objek peneliti adalah Batam Pos. Batam Pos adalah surat kabar harian pertama yang juga terbit di Kepulauan Riau pada tahun 1998. Sejak pertama kali terbit, nama koran ini adalah Sijori Pos, namun pada tahun 2003, berubah menjadi Batam Pos. Batam Pos tergabung dalam grup Jawa Pos National Network (JPNN). Kehadiran Batam Pos sebagai media cetak tertua yakni sudah 16 tahun menyatakan eksistensinya di Kepulauan Riau

setidaknya menjawab kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat di Kepri khususnya Kota Batam. Batam Pos pernah meraih penghargaan Bronze Winner dalam ajang Indonesia Print Media Awards (IPMA) yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers tahun 2012. Ajang IPMA adalah kegiatan agenda rutin yang diadakan Serikat Perusahaan Pers dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (Riau Pos, 2012)

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembedaan Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos dalam menyikapi pemberitaan kontroversi terbitnya surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan dengan menggunakan pendekatan jurnalisme lingkungan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui frame atau cara pandang yang digunakan Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos dalam menyikapi pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos dalam menyikapi pemberitaan kontroversi terbitnya SK

Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan.

3. Untuk mengetahui bagaimana pemberitaan kontroversi turunnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 bila dilihat dengan menggunakan pendekatan jurnalisme lingkungan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu komunikasi dan bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan metode analisis framing dalam media massa lokal.
2. Manfaat Praktis: Memberikan gambaran kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana media menggambarkan suatu masalah atau kontroversi dan juga bagaimana pembaca diberikan pengetahuan melalui pendekatan jurnalisme lingkungan dalam masalah ini.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori pada proses penelitian ini digunakan sebagai perangkat untuk menganalisis data penelitian. Maka dari itu, penulis akan membaginya dalam beberapa pokok bahasan antara lain:

E.1 Jurnalisme Lingkungan

Jurnalisme lingkungan selalu berpihak pada kesinambungan lingkungan hidup, artinya orientasi berita mengarah pada pemeliharaan lingkungan hidup.

Berita lingkungan hidup pada dasarnya sama dengan berita lain seperti berita ekonomi, politik, kriminal, hukum, dan sebagainya. Namun, yang membedakan adalah realitas yang menjadi bahan bakunya. Bahan baku berita lingkungan hidup adalah realitas lingkungan hidup seperti polusi udara dan suara, penggundulan hutan, pencemaran sampah, kerusakan akibat pestisida, kerusakan akibat penggunaan pupuk yang berlebihan, pencemaran industri, dan sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut lingkungan hidup semakin berkembang pesat karena adanya asumsi bahwa dunia ini harus dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Menurut Abrar (1993: 76), realitas lingkungan hidup dengan berbagai usaha pelestarian alam, pada akhirnya akan mempengaruhi alam secara keseluruhan sebagai perannya sebagai sebuah sistem. Apapun realitas lingkungan hidup yang ditemui wartawan, akan berpengaruh pada produk berita yang dibuatnya. Bila wartawan ingin berita tentang lingkungan hidup dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka untuk memelihara alam, konteks alam secara keseluruhan akan menjadi sebuah kebutuhan.

Menurut Pemimpin Umum Harian Kedaulatan Rakyat, M. Soemadi Wonohito, SH dalam Abrar (1993:66) mengatakan ada peran kerja pers sebagai media yang harus menjalankan fungsinya yakni fungsi informasi dan fungsi edukasi. Peranan pers dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat; (2) mengangkat isu kemungkinan adanya pencemaran serta

bahayanya dan (3) menjadi mediator di antara pihak-pihak terkait dalam terjadinya kasus pencemaran lingkungan.

Jurnalisme lingkungan hidup menjadi sebuah pendekatan khas, meruntut penerapannya yang membutuhkan keterampilan jurnalistik standar, artinya membutuhkan pengetahuan yang cukup dan komprehensif menyangkut alam dan manusia. Dua faktor ini nantinya akan berhubungan dengan pembangunan dan ekonomi secara holistik, memberikan dampak fisik dan sosial tentang kerusakan lingkungan hidup, dan bagaimana menanggulangi kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Pemberitaan tentang lingkungan hidup akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam. Metro TV melalui pemberitaannya di media online mengemukakan masalah perubahan iklim yang terjadi di tiga wilayah di Indonesia yakni Palembang, Malang, dan Tarakan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kajian Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), ketiga kota tersebut mendapat perhatian khusus karena dampak dari perubahan iklim menyebabkan adanya perubahan ekosistem dan gagal panen. Di Palembang terjadi kenaikan pasang surut air laut yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, yakni 0,55 m hingga 0,7 m. Di Malang yang berkondisi geografis adalah dataran tinggi, mengalami gagal panen apel malang. Tanaman menjadi sulit berbuah karena ketidakstabilan iklim, dan Tarakan mengalami fenomena *coral bleaching* dan rusaknya ekosistem bakau. Melalui pemberitaan ini, diharapkan masyarakat

Indonesia semakin peduli dengan lingkungan karena ancaman perubahan iklim semakin nyata (MetroTv, 2013).

Pemberitaan tentang lingkungan hidup hanya diorientasikan pada pemeliharaan lingkungan hidup saat ini agar dalam jangka panjang, masih dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya bahkan diharapkan menjadi lebih baik. Media menjalankan fungsi pendidikan dan informasinya untuk memberitakan hal terkait lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat agar peduli dan peka terhadap masalah lingkungan yang sedang dihadapi saat ini.

Pemahaman terhadap jurnalisme lingkungan tidak berhenti pada pemeliharaan lingkungan hidup, namun bagaimana lingkungan hidup yang seharusnya dikelola dengan baik, justru disalahgunakan. Banyak kasus yang terjadi di luar Indonesia tentang eksploitasi hutan yang kemudian mengubah kultur masyarakat. Kasus ini terjadi di India dan berdasarkan artikel ilmiah hasil penelitian dari Benjamin Weil pada tahun 2006. Dalam artikelnya dikatakan bahwa Menteri Kehutanan di India justru melegalkan eksploitasi hutan dan tidak mengkonservasi hutan tersebut untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati. Weil menganalisis bukan dari sisi nilai-nilai lingkungan akibat eksploitasi hutan seperti adanya erosi tanah, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati, melainkan ia menitikberatkan bagaimana perubahan sikap terhadap teknologi yang turut mengubah perlakuan Menteri Kehutanan terhadap hutan. Menurut argumennya, jika dulu hutan dikelola oleh rakyat dengan cara yang tradisional, tetapi sejak berkembangnya teknologi, cara rakyat memperlakukan hutan juga menjadi beda, menjadi lebih eksploitatif demi keuntungan ekonomis semata (Weil, 2006: 336)

E.2 Berita sebagai Produk Media Massa

Dalam praktik jurnalistik, berita menduduki posisi utama. Hampir seluruh isi surat kabar adalah berita. Berita sebagai pemenuhan keingintahuan pembaca akan informasi dengan memberi kabar dari segala penjuru dunia. Informasi yang diberikan juga terkait dengan peristiwa, kejadian, gagasan dan fakta yang menarik.

Menurut Barus (2010:31-32), ada pula yang mengatakan bahwa untuk menilai apakah unsur suatu kejadian memiliki nilai berita atau tidak, reporter harus dapat melihat unsur-unsur yakni penting atau *significance* bahwa berita harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan orang banyak. Kejadiannya memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan khalayak pembaca. Unsur lainnya adalah besaran atau *magnitude*, berita berasal dari sesuatu yang besar baik dari segi jumlah, nilai, atau angka yang besar hitungannya. Berita menjadi sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui orang banyak. Kebaruan atau *timeless* adalah unsur berita yang memuat peristiwa yang baru saja terjadi, bahwa berita harus bersifat aktual karena berkaitan dengan tenggat waktu yang menyatakan bahwa kejadian tersebut masih hangat, bukan berita basi atau terlambat memenuhi waktu pemuatan yang sudah ditetapkan pemimpin redaksi. Di sisi lain, unsur kedekatan atau *proximity* yakni unsur yang memiliki kedekatan jarak (geografis) ataupun emosional dengan pembaca, termasuk kedekatan profesi, minat, bakat, hobi, dan perhatian pembaca. Unsur dalam nilai berita yang lain yakni ketermukaan atau *prominence*, adalah hal-hal yang mencuat dari diri seseorang atau sesuatu benda, tempat, atau kejadian. Ketermukaan berhubungan dengan peristiwa yang

menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat menjadi berita penting untuk diketahui oleh pembaca. Unsur terakhir dalam nilai berita adalah unsur sentuhan manusiawi atau *human interest*, yakni sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan, menggugah hati dan minat.

E.3 Media adalah Agen Konstruksi

Media membentuk dan memaknai realitas sosial sesuai dengan kepentingan mediana, artinya setiap pemberitaan media muncul dengan sisi tertentu sesuai dengan bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan ditampilkan. Hal ini disebabkan dari hasil peliputan yang dilakukan pekerja media dengan mewawancarai orang-orang tertentu sehingga membentuk sudut pandang tertentu. Pekerja media hanya menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi sesuai dengan penafsiran mereka tentang apa yang mereka lihat dan rasakan, sehingga konstruksi realitas sosial dibentuk oleh pekerja media tersebut. (Eriyanto, 2007: 2-3).

Menurut Wahyudi (1991: 90) Pada dasarnya media massa merupakan sarana untuk menyampaikan isi berita pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Media massa bertugas melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar kepada masyarakat. Tugas media massa, merupakan bentuk dari kegiatan jurnalistik yang dimulai dengan memilih dan mengumpulkan fakta, mencari informasi dan mewawancarai narasumber, menulis

berita, menyunting serta menyiarkan berita kepada khalayak. Melalui media massa masyarakat dapat melihat gambaran suatu peristiwa berdasarkan realita atau fakta yang ada.

Menurut Eriyanto (2002:23) dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksikan realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Disini media dianggap sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber media, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Media hanyalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak. Media massa tidak sekedar menyajikan berita yang berisi fakta dan peristiwa yang terjadi secara apa adanya, media melalui para pekerjanya dan melalui kegiatan redaksional serta seperangkat kriteria mencoba memilih dan memilah peristiwa mana yang layak dijadikan berita dan mana yang tidak karena tidak semua peristiwa dapat dikatakan layak diberitakan.

Semua media pada dasarnya membawa bias-bias tertentu dan sangat berpengaruh pada wartawan yang bekerja di lingkungan media. *Cooperate culture* ini akan mempengaruhi konstruksi dari pribadi wartawan dan juga pihak-pihak yang berada dalam industri media yang seringkali ikut campur tangan dalam terbentuknya berita tersebut. Media seringkali melakukan pembingkaihan berdasarkan ideologi dari media itu sendiri. Kepentingan-kepentingan dari

berbagai golongan dalam industri media, turut serta mempengaruhi isi pesan dalam pemberitaan di media massa (Sobur,2006:95).

E.4 Framing sebagai strategi Konstruksi realitas

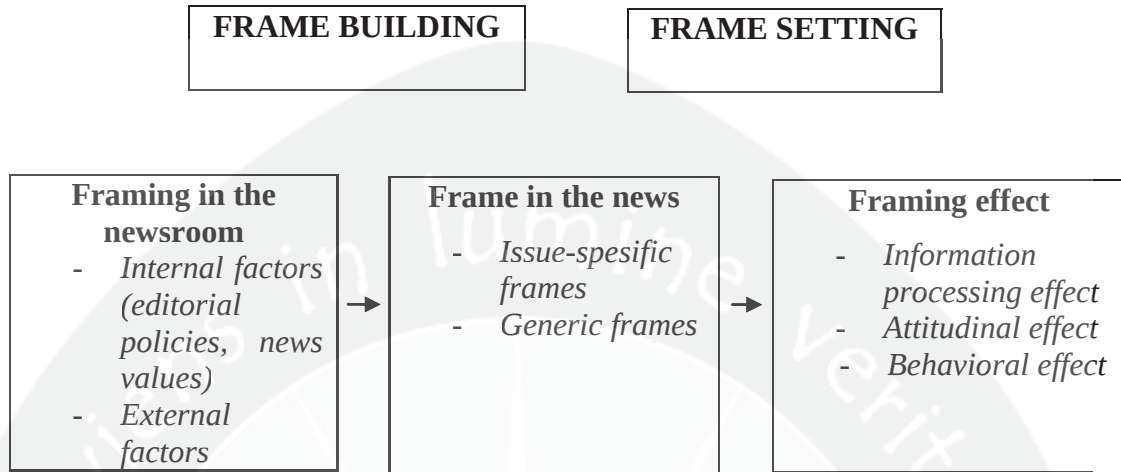
Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Analisis framing secara sederhana dapat didefinisikan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas sebuah peristiwa, aktor, atau kelompok dibingkai oleh media. Realitas yang dibingkai media tersebut dijadikan berita yang kemudian berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media tersebut. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca. Menurut Sobur (2007:162) dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh de Vreese (2005:51) tentang “*News Framing: Theory and Typology*”, mengatakan bahwa salah satu cara pengaruh media dapat membentuk pendapat masyarakat adalah dengan membingkai peristiwa atau isu-isu dengan cara khusus. Menurutnya, framing melibatkan sumber komunikasi dalam menyajikan dan mendefinisikan masalah. Vreese menyadari bahwa ada

berbagai jenis frame yang diperlukan untuk memahami kapan dan mengapa peristiwa tersebut terjadi sehingga terdapat perbedaan penafsiran ketika frame tersebut sedang bekerja. Pendefinisian framing oleh de Vreese sebagai suatu proses yang didalamnya diintegrasikan pada bentuk framing yang termasuk di dalamnya produksi, konten, dan penggunaan sudut pandang oleh media tersebut.

De Vreese menggunakan tipologi framing untuk mendefinisikan proses model framing. Tipologi ini berfokus pada perbedaan dalam pembentukan frame berita yang nantinya akan membantu menjelaskan penggunaan *catch-all 'framing' frase*. Ia menekankan pada *issue-specific frame* dan *generic frame*. Kedua tipologi ini digunakan sebagai titik acuan ketika memberi penjelasan sifat frame tersebut (de Vreese, 2005:54).

Gambar 1.1
Model Framing Claes de Vreese



An integrated model process of framing.
Sumber: Claes de Vreese (2005:52)

- ***Framing In The Newsroom***

Proses *frame building* terjadi di dalam keredaksian suatu media. Menurut Shoemaker & Reese dalam Vreese (2005:52) mengatakan bahwa *frame building* mengacu pada faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi kualitas struktural dalam frame berita. Hasil akhir dari *frame building* terwujud dalam bentuk teks berita.

Faktor internal sendiri berlaku untuk wartawan dan organisasi media itu sendiri dalam memberitakan suatu peristiwa atau kejadian. Sementara itu, faktor eksternal juga berlaku karena adanya interaksi secara berulang antara wartawan dengan elit kepentingan.

- **Frame In The News**

Menurut Semetko dan Valkenburg (2000) dalam de Vreese (2005:56) ia mengembangkan penelitian tentang frame berita dengan mengidentifikasikan lima frame berita karena memiliki kemampuan mempengaruhi arah pikiran khalayak, yakni:

(1) Konflik. Konflik yang dibingkai dalam berita memberikan penekanan konflik antara individu, kelompok, lembaga, atau negara. (2) *Human Interest*, yakni frame berita yang membawa cerita tentang manusia, individu, atau mengambil sudut pandang emosional. (3) Atribusi tanggung jawab, yakni frame berita yang menyajikan suatu permasalahan namun harus menyertakan unsur pemecahan kasus baik itu dari pemerintah, kelompok, atau individu.

(4) Moralitas, yakni frame berita yang menafsirkan suatu peristiwa atau isu berdasarkan konteks nilai-nilai moral maupun ajaran agama. (5) Konsekuensi ekonomi yakni frame berita yang menyajikan suatu peristiwa, masalah, atau isu dalam hal ekonomi yang akan terjadi pada seorang individu, kelompok, lembaga, atau negara.

Frame berita membawa nilai yang melekat di masyarakat, menekankan pada aspek positif dan negatif dari sebuah isu, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi publik dalam mendukung sebuah kebijakan. Dalam frame berita juga terdapat *issue-specific-frames* dan *generic frames*. Vreese mengemukakan bahwa tipologi ini dibuat lebih umum karena mengacu pada sifat dan isi frame berita. Frame isu spesifik lebih menekankan pada topik tertentu saja sehingga mengulas isu lebih mendalam dan detail atau isu yang harus diselidiki.

Namun, disisi lain, *generic frame* berada pada penggambaran isu secara umum, melampaui keterbatasan tematik dari berita tersebut sehingga dapat diidentifikasi kaitannya dengan topik yang berbeda, bahkan dapat menjangkau waktu dan budaya yang berbeda (de Vreese, 2005: 55-60).

- ***Framing Effects***

Frame setting akan berpengaruh pada terbentuknya *framing effects* yakni proses pengolahan informasi, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. *Frame setting* mengacu pada interaksi antara *frame* media dengan pengetahuan serta kecenderungan individu yang menerima pesan dari media tersebut. Hal ini harus disadari, bahwa konsekuensi dari framing dapat dipahami pada individu dan masyarakat. Bagi individu, *frame effect* memberi tingkat konsekuensi yang dapat mengubah sikapnya tentang masalah tertentu, sedangkan untuk level masyarakat, *frame effect* dapat memberikan kontribusi membentuk tingkat proses sosial seperti sosialisasi politik, pengambilan keputusan, serta tindakan kolektif (de Vreese, 2005: 52)

F. METODE PENELITIAN

F.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2004: 4) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara utuh(*holistic*).

Senada dengan Mulyana (2002:150) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, dan tindakan sosial menjadi bahan untuk analisis kualitatif.

Penelitian yang bersifat kualitatif ini berupa sikap SKH Tribun Batam dan Batam Pos terhadap kontroversi pemberitaan terbitnya SK Menhut No 463/Menhut-II/2013. Sehingga, untuk memahami dan menafsirkan kasus tersebut, peneliti menggunakan analisis framing model Zhongdan Pan dan Gerald M.Kosicki pada level teks dan akan dibantu dengan wawancara untuk memahami konteks.

F.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah redaksi Harian Tribun Batam dan Batam Pos yang terlibat dalam proses pembuatan berita terkait dengan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013, dalam hal ini redaktur serta wartawan yang menulis berita terkait kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013

F.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita-berita mengenai kontroversi terbitnya SK Menhut pada SKH Tribun Batam dan Batam Pos periode 23 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013. Tribun Batam adalah surat kabar bagian dari

Tribun Network. Tribun Network adalah kelompok persda yang tergabung dalam Kompas Gramedia Group (KGG), sedangkan Batam Pos adalah surat kabar lokal yang tergabung dalam kelompok media Jawa Pos National Network (JPNN). Tribun Batam dan Batam Pos bila dilihat dari sisi geografisnya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan masalah ini disamping menjalankan fungsi pers-nya sebagai fungsi informasi. Keduanya memiliki intensitas yang cukup sering dalam pemberitaan ini.

Peneliti memilih *time frame* dari bulan Juli hingga Agustus 2013 dikarenakan pada waktu inilah kontroversi mencuatnya turunnya SK Menhut yang meresahkan masyarakat Kota Batam karena akan ada banyak sektor yang dirugikan. Pada awal pemberitaan ini, diberitakan bahwa Menhut menggagalkan pemutihan lahan sehingga menimbulkan penolakan dari banyak pihak.

Peneliti menemukan 23 pemberitaan yang mengulas tentang kontroversi terbitnya SK Menhut no 463/Menhut-II/2013 dalam SKH Tribun Batam dan 17 pemberitaan kasus serupa dalam SKH Batam Pos, keduanya memiliki periode 23 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013. Berikut adalah judul berita tersebut:

Tabel 1.1
Berita SKH Tribun Batam Terkait Kontroversi SK Menhut

NO	JUDUL BERITA	WAKTU TERBIT
1	Menhut Ganjal Lahan di Batam.	23 Juli 2013, hlmn 1
2	Sani Datangi Zulkifli Hasan	23 Juli 2013, hlmn 1
3	OB Harus Tanggungjawab!	24 Juli 2013, hlmn 1
4	Kami Tetap Perjuangkan	24 Juli 2013, hlmn 1
5	Rumah Lunas Tanpa Sertifikat	25 Juli 2013, hlmn 1
6	Saya Khawatir Ada Barter	25 Juli 2013, hlmn 1
7	BI Evaluasi Bank	25 Juli 2013, hlmn 1
8	Judicial Review Kita Optimis Menang	26 Juli 2013, hlmn 1
9	75 Lahan Tidur akan Dicabut	27 Juli 2013, hlmn 1
10	Harga Rumah Kami Turun	29 Juli 2013, hlmn 1

11	Gugat Lewat PTUN	29 Juli 2013, hlmn 1
12	Dahlan Lapor Soal Lahan ke Gubernur	30 Juli 2013, hlmn 1
13	Jangan Umbar Angin Surga	31 Juli 2013, hlmn 1
14	BPN “Atur” Keabsahan Sertifikat	1 Agustus 2013, hlmn 1
15	Batuaji Masuk Hutan Wisata	2 Agustus 2013, hlmn 1
16	BP Batam Stop Alokasi Lahan	6 Agustus 2013, hlmn 9
17	SK Menhut Meresahkan	6 Agustus 2013, hlmn 9
18	Investasi Batam Darurat	26 Agustus 2013, hlmn 1
19	Koin Diserahkan ke Menhut	26 Agustus 2013, hlmn 11
20	Dayat Akan Gugat Gubernur	28 Agustus 2013, hlmn 9
21	BP Batam Siap Tanggungjawab	29 Agustus 2013, hlmn 1
22	Sani: SK Menhut Tak Jadi Acuan	30 Agustus 2013, hlmn 1
23	Sertifikat Bisa Diagunkan ke Bank	31 Agustus 2013, hlmn 1

Tabel 1.2

Berita SKH Batam Pos Terkait Kontroversi SK Menhut

NO	JUDUL BERITA	WAKTU TERBIT
1	Pulau Penyengat Masuk Hutan Konservasi	23 Juli 2013, hlmn 29
2	SK Menhut Mandekkan Investasi	24 Juli 2013, hlmn 17
3	Lahan Batam Didata Ulang	25 Juli 2013, hlmn 1
4	Kemenhut Disetujui Untuk Industri	25 Juli 2013, hlmn 17
5	Warga Penyengat Protes	25 Juli 2013, hlmn 29
6	Pemprov Revisi Perda RT RW	27 Juli 2013, hlmn 33
7	Status Hutan Lindung Belum Final	30 Juli 2013, hlmn 1
8	Penolakan SK Menhut Terus Mengalir	31 Juli 2013, hlmn 29
9	Dinas Kehutanan Bentuk Tim Kecil	1 Agustus 2013, hlmn 29
10	Kadin – BP Batam Bahas SK Menhut	14 Agustus 2013, hlmn 17
11	Status Lahan Pinang-Bintan Ganjal Investor	15 Agustus 2013, hlmn 25
12	Kadin Batam Abaikan SK Menhut	21 Agustus 2013, hlmn 23
13	Investasi Batam Lampu Merah Akibat SK Menhut	26 Agustus 2013, hlmn 4
14	Bibir Pantai Batam Jadi Hutan Lindung	28 Agustus 2013, hlmn 1
15	Nagoya Masuk Hutan Lindung	29 Agustus 2013, hlmn 1
16	Gugat SK Menhut	30 Agustus 2013, hlmn 1
17	Tantang Penggugat di Pengadilan	31 Agustus 2013, hlmn 1

F.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 2 level, yakni level teks dan level konteks. Analisis framing tidak hanya meneliti teks saja namun juga membutuhkan konteks untuk mengetahui bagaimana frame media dalam memberitakan terkait kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013.

F.4.1 Level Teks

Menurut Hidayat dalam Sobur (2006:53) mengatakan bahwa teks adalah fiksasi atau pelebagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Ia menganggap bahwa tulisan adalah bahasa lisan yang dituangkan dalam tulisan dan teks adalah wacana (lisan) yang difiksasikan dalam bentuk teks. Peneliti menggunakan teks media dengan tujuan untuk mengetahui penonjolan dan penyembunyian suatu fakta akan dapat diketahui melalui pemilihan kata, pembentukan kalimat, *lead*, hubungan antar kalimat, foto, grafik, dan perangkat lain yang dapat digunakan untuk menimbulkan penafsiran yang diinginkan khalayak (Sobur,2006:56).

Pada level teks, peneliti menggunakan teks media yakni berita-berita mengenai kontroversi terbitnya SK Menhut pada SKH Tribun Batam dan Batam Pos pada rentang waktu yang telah ditentukan, yakni berita-berita edisi 23 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013. Analisis teks media ini dilakukan untuk melihat posisi berita, bagaimana sikap redaksional yang tercermin dalam berita, bagaimana frame media terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.

Peneliti menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik untuk meneliti teks berita. Berita yang dipilih oleh

peneliti untuk objek penelitian adalah berita pada SKH Tribun Batam dan Batam Pos edisi 23 Juli hingga 31 Agustus 2013.

Penelitian level teks ini, untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis, peneliti menyeleksi kembali artikel-artikel berita yang sesuai dengan topik penelitian yakni kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013. Artikel sebanyak 23 berita dari SKH Tribun Batam diseleksi menjadi 4 tema besar dengan masing-masing kategori diambil 1 artikel yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kategori Artikel Analisis SKH Tribun Batam

Tema: Gagalnya Pemutihan Rumah

NO	Artikel	Edisi
1	OB Harus Tanggungjawab !	24 Juli 2013 h.1

Tema: Dampak Turunnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013

NO	Artikel	Edisi
1	Investasi Batam Darurat	26 Agustus 2013 h.1

Tema: Aksi Protes dan Penolakan Terhadap Terbitnya SK Menhut

NO	Artikel	Edisi
1	Gugat Lewat PTUN	29 Juli 2013 h.1

Tema: Tanggapan Pemerintah Daerah Terhadap Terbitnya SK Menhut

NO	Artikel	Edisi
1	BP Batam Siap Tanggung Jawab	29 Agustus 2013 h.1

Sedangkan dari SKH Batam Pos, peneliti menemukan 17 berita, diseleksi menjadi 3 tema besar dengan masing-masing kategori diambil 1 artikel yakni sebagai berikut:

Tabel 1.4

Kategori Artikel Analisis SKH Batam Pos

Tema: Dampak Turunnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013

NO	Artikel	Edisi
1	Investasi Batam Lampu Merah Akibat SK Menhut	26 Agustus 2013 h.4

Tema: Aksi Protes dan Penolakan Terhadap Terbitnya SK Menhut

NO	Artikel	Edisi
1	Kadin Batam Abaikan SK Menhut	21 Agustus 2013 h.23

Tema: Tanggapan Pemerintah Daerah Terhadap Terbitnya SK Menhut

NO	Artikel	Edisi
1	Lahan Batam di Data Ulang	25 Juli 2013 h.1

Peneliti mengelompokan 23 artikel berita SKH Tribun Batam ke dalam 4 tema besar dan 17 artikel berita SKH Batam Pos ke dalam 3 tema besar karena pemberitaan terkait kontroversi terbitnya SK Menhut ini terdiri dari pihak pemerintah dan masyarakat Kota Batam yang merasa dirugikan dengan terbitnya SK Menhut ini. Keempat tema besar dari masing-masing surat kabar lokal ini kemudian diambil masing-masing satu artikel untuk diteliti mewakili dari setiap tema. Sehingga, teks berita yang akan dianalisis sebanyak 7 artikel berita, dengan komposisi analisis 4 berita untuk SKH Tribun Batam dan 3 berita untuk SKH Batam Pos. Analisis tujuh artikel berita ini diharapkan mampu menjawab frame yang digunakan SKH Tribun Batam dan Batam Pos dalam menyikapi kontroversi terbitnya SK Menhut ini.

F.4.2 Level Konteks

Dalam analisis framing, peneliti tidak hanya meneliti bagian teksnya saja, namun hal yang juga penting adalah konteks. Konteks itu penting karena teks itu diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Menurut Guy Cook dalam Sobur (2006: 56) menerangkan konteks sebagai memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa.

Pada level konteks, peneliti melakukan analisis dengan cara menggali informasi secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan awak redaksi dari SKH Tribun Batam dan Batam Pos. Awak redaksi dari SKH Tribun Batam yaitu: Purwoko selaku koordinator peliputan dan Agus Tri Harsanto selaku manager produksi yang juga turut menulis dalam beberapa pemberitaan terkait kontroversi terbitnya SK Menhut No.463. Sedangkan awak redaksi Batam Pos yaitu Wakil Pemimpin Redaksi, Muhammad Nur dan Herry Dingin Sembiring selaku redaktur yang juga turut menulis dalam beberapa pemberitaan terkait kasus serupa. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang dan ideologi wartawan dan kebijakan redaksi yang mempengaruhi proses sebuah teks berita.

F.5 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis framing. Analisis framing secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembingkaihan media terhadap sebuah realitas, baik peristiwa, tokoh, atau apa saja (Eriyanto, 2002: 3). Analisis framing sendiri termasuk dalam paradigma konstruktivisme,

yang beranggapan bahwa pemberitaan merupakan buah dari konstruksi media terhadap sebuah realitas.

Model framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pan dan Kosicki yang mendefinisikan framing sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto, 2002: 252). Pan dan Kosicki juga menjelaskan bahwa dalam membentuk konstruksi sebuah realitas, seorang wartawan tidak hanya menggunakan pandangan atau persepsi dari dirinya sendiri. Setidaknya, ada tiga tahap yang dilalui seorang wartawan dalam menentukan arah pembedingnya. *Pertama*, wartawan menggunakan referensi nilai atau pengetahuan yang ia miliki dan yang tertanam dalam memandang sebuah realitas. *Kedua*, saat menulis wartawan tidak berhadapan dengan khalayak yang 'kosong'. Ia menulis bukan untuk dirinya sendiri, dan inilah yang membuat nilai-nilai dominan dalam masyarakat ikut menentukan pemahaman dan pemaknaan. *Ketiga*, sebuah proses produksi yang menuntut standar kerja dan profesionalisme seorang wartawan juga turut serta mempengaruhi proses konstruksi (Eriyanto, 2002: 254).

Perangkat framing Pan dan Kosicki berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi dari ide. Frame didefinisikan sebagai suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi dalam empat struktur besar, yakni:

- **Struktur sintaksis**, berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa dilihat dari pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk teks berita. Struktur sintaksis ini dapat diamati dari bagian berita seperti *headline*, yakni aspek sintaksis dari wacana berita dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. *Headline* digunakan untuk bagaimana wartawan mengkonstruksikan isu dengan adanya penekanan makna tertentu. Selain *headline*, *lead* merupakan perangkat sintaksis yang lain. *Lead* pada umumnya menunjukkan sudut pandang dari berita. Selanjutnya adalah latar, wartawan biasanya mengemukakan latar belakang peristiwa sehingga sangat menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Bagian berita yang lainnya yakni pengutipan sumber tertentu. Bagian ini dalam penulisan berita dimaksudkan untuk membangun obyektivitas karena mengacu pada prinsip keseimbangan dan tidak memihak. Pengutipan sumber tertentu ini menekankan bahwa apa yang ditulis wartawan bukan pendapat wartawan semata, melainkan pendapat dari orang yang memiliki otoritas tertentu.
- **Struktur skrip**, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5W + 1H, yakni *who*, *what*, *when*, *where*, *why*, dan *how*. Skrip merupakan strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita, artinya bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian tertentu dengan urutan tertentu.

- **Struktur tematik**, berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis.

Wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Elemen yang dapat diamati dari struktur tematik salah satunya adalah koherensi. Ada beberapa macam koherensi, pertama, koherensi sebab-akibat yang ditandai dengan menggunakan kata hubung “sebab” atau “karena”, koherensi perjelas ditandai dengan pemakaian kata hubung “dan” atau “lalu”, dan koherensi pembeda ditandai dengan pemakaian kata hubung “dibandingkan” atau “sedangkan”.

- **Struktur retorik**, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita dengan cara penggunaan pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai (Eriyanto, 2002: 255-264).

Tabel 1.5
Kerangka Framing Pan dan Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.</i>
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.
RETORIS Cara	7. Leksikon 8. Grafis	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.

wartawan menekankan fakta	9. Metafora	
---------------------------------	-------------	--

Sumber: Eriyanto (2002:256)

Analisis framing model Pan dan Kosicki menempatkan setiap bagian dari struktur berita yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik sebagai perangkat framing. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- ✓ Mengamati *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan bagian penutup berita
- ✓ Melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meliputi pertanyaan apa, kapan, siapa, dimana, mengapa, dan bagaimana.
- ✓ Membaca detail, bentuk kalimat, kata ganti, dan koherensi. Oleh karena itu, unit dalam berita yang harus dicermati adalah pada setiap paragraf dan proposisi di dalamnya.
- ✓ Melihat leksikon, grafis, dan metafora untuk memberikan tekanan pada makna tertentu.

Keempat perangkat framing diatas, dibagi menjadi dua tahap analisis yakni analisis seleksi dan analisis saliansi. Pada tahap analisis seleksi akan nampak bagaimana pemilihan kata dan peristiwa. Tahap analisis yang kedua adalah analisis saliansi, pada tahap ini akan terlihat bagaimana penekanan dan penonjolan fakta dari sebuah peristiwa. Kemudian dari dua tahap analisis ini, dapat ditemukan bagaimana frame yang dihadirkan media dalam teks beritanya.

Peneliti kemudian menyusun *coding sheet* untuk digunakan sebagai pedoman analisis.



Tabel 1.6
Coding Sheet Analisis Framing Pan dan Kosicki

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS PENONJOLAN	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STUKTUR RETORIS
Identifikasi objek wacana (realitas) yang diangkat	Identifikasi atas jenis wacana apakah yang dilantukan baik oleh pelibat dan pelantun wacana di atas.	Identifikasi terhadap placement masing-masing temuan di atas dalam struktur sebuah pemberitaan.	Identifikasi terhadap metafora, <i>exemplars</i> , <i>keyword</i> , <i>depiction</i> , <i>visual image</i> .
Identifikasi atas pelibat wacana (subjek) bentuk keterlibatannya atau bentuk pernyataannya.	Identifikasi terhadap pola hubungan yang muncul dalam teks antara satu wacana dengan wacana yang lain, antara pelibat wacana dengan objek wacana.	Identifikasi terhadap placement masing-masing temuan di dalam distribusi pembagian halaman.	Identifikasi terhadap makna perangkat retorik di atas.
Identifikasi atas pelantun wacana (narasumber), pernyataannya serta kepentingan yang direpresentasikan.			Identifikasi fungsi perangkat retorik di atas.
Mengapa dan untuk apa keterlibatan daan pernyataan pelibat dan pelantun			
FRAME SELEKSI		FRAME SALIANSI	
Frame ini didapat dari kedua analisis struktur skrip dan tematik, dimana temuannya memperlihatkan frame pemilihan fakta yang dilakukan wartawan atau media terhadap sebuah peristiwa.		Frame ini didapat dari kedua analisis struktur sintaksis dan retorik, yang mana temuannya memperlihatkan frame penekanan atau penonjolan fakta yang dilakukan wartawan atau media pada peristiwa tersebut	
MEDIA FRAME			
Berdasarkan frame seleksi dan frame saliansi, gabungan penjelasan dari analisis kedua frame akan menunjukkan atau menjawab bagaimana frame yang dilakukan media terhadap peristiwa melalui beritanya.			

Sumber: Modul Kuliah Analisis Isi dan Framing Danarka Sasangka (2011)